



EFEKTIFITAS PELAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI SIMONIBARJAS KABUPATEN NIAS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS

Kristian Jaya Mendrofa¹, Maria Magdalena Bate'e², Yosmar Zalukhu³, Idarni Harefa⁴

Alamat : Alamat: Jl. Karet No.30, Ps. Gn. Sitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Fakultas Ekonomi Universitas Nias

Korespondensi penulis: *kristianjayam@gmail.com, maria.batee82@gmail.com, yosmar_z@yahoo.com,
idarniharefa@gmail.com

Abstract. The phenomenon underlying this research is the ineffectiveness of the centralized AMEL application previously used for procurement reporting at the Regional Secretariat of Nias Regency. Issues such as delays in data presentation, low report accuracy, generalized reporting, and the absence of real-time information made it difficult for leaders to make data-based decisions. In response, the local government developed the SIMONIBARJAS application, a locally based and integrated system designed to provide faster, more detailed, accurate, and real-time reporting. The research problems focus on: (1) the effectiveness of the SIMONIBARJAS application in supporting procurement reporting; (2) the extent to which it addresses AMEL's weaknesses; (3) users' perceptions of its ease of use, speed, and reliability; and (4) the role of human resources in supporting its implementation. The findings indicate that SIMONIBARJAS is effective in improving reporting quality by accelerating data presentation, increasing accuracy, providing more detailed reports, and supporting real-time information access for decision-makers. Moreover, inter-unit integration has improved, enabling faster and more accountable decision-making processes. However, challenges remain, including limited user understanding of some features and technical issues such as internet stability, which require further improvement.

Keywords: Effectiveness, Reporting, Procurement of Goods and Services, SIMONIBARJAS, Nias Regency.

Abstrak Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum efektifnya sistem pelaporan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias ketika masih menggunakan aplikasi AMEL yang bersifat terpusat. Permasalahan seperti keterlambatan penyajian data, rendahnya akurasi laporan, laporan yang bersifat umum, serta ketiadaan informasi real-time menyebabkan pimpinan kesulitan dalam mengambil keputusan berbasis data. Sebagai respons, Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi SIMONIBARJAS yang bersifat lokal, terintegrasi, dan dirancang untuk menghadirkan laporan yang lebih cepat, rinci, akurat, serta real-time. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada: (1) efektivitas aplikasi SIMONIBARJAS dalam mendukung pelaporan pengadaan barang dan jasa; (2) sejauh mana aplikasi ini mampu mengatasi kelemahan AMEL; (3) persepsi pengguna terhadap kemudahan, kecepatan, dan keandalan SIMONIBARJAS; serta (4) peran sumber daya manusia dalam mendukung implementasi aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMONIBARJAS efektif meningkatkan kualitas pelaporan dengan mempercepat penyajian data, meningkatkan akurasi, menyajikan laporan lebih rinci, dan mendukung akses informasi real-time bagi pimpinan. Integrasi antarunit juga menjadi lebih baik, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Kendati demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman pengguna dan faktor teknis seperti kestabilan jaringan internet yang perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Efektivitas, Pelaporan, Pengadaan Barang/Jasa, SIMONIBARJAS, Kabupaten Nias.

LATARBELAKANG

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pengelolaan pengadaan barang dan jasa memegang peran penting yang mendukung kelancaran pembangunan adalah proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan ini tidak hanya mencakup pembelian barang fisik, tetapi juga mencakup penyediaan layanan dan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak pemerintah daerah mulai berinovasi dalam sistem pelaporan pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses tersebut. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang adalah penerapan aplikasi berbasis sistem informasi yang memfasilitasi proses pelaporan secara digital. Pelaporan berbasis sistem informasi ini bertujuan untuk mempermudah monitoring, mempercepat akses informasi, mengurangi potensi penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan yang dilakukan pemerintah.

Penerapan sistem informasi dalam pelaporan pengadaan juga mendukung integrasi data antar unit kerja, sehingga mempermudah proses evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen maupun auditor internal dan eksternal. Dengan adanya pelaporan digital, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dan rentan terhadap keterlambatan serta human error dapat diminimalkan. Selain itu, sistem informasi memungkinkan adanya pelacakan dokumen secara real-time dan penyimpanan data yang lebih terstruktur, sehingga proses audit dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu pula sebaliknya (Agustina, 2020:36). Menurut Syam (2020), efektivitas adalah tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input. Hal ini berlaku untuk suatu perusahaan atau seseorang. Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin mendekati tujuan, maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas dapat diukur

dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Pengadaan Barang/Jasa adalah proses kegiatan untuk memperoleh barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan ini dilakukan melalui mekanisme tertentu yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari segi kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan pengawasan serta pelaporan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah secara efektif dan efisien, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui proses yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung arah digitalisasi birokrasi, salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini menegaskan pentingnya penerapan teknologi digital untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan terpercaya, termasuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

Dalam konteks ini, pelaporan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu aspek krusial yang harus ditransformasikan secara digital agar lebih adaptif terhadap kebutuhan instansi pemerintah, khususnya di tingkat daerah. Pelaporan pengadaan yang lambat, tidak akurat, dan tidak real-time dapat menghambat pengambilan keputusan, memperbesar peluang terjadinya kesalahan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Nias, melalui Sekretariat Daerah, selama ini menggunakan sistem Aplikasi Monitoring Evaluasi (AMEL) untuk melakukan pelaporan pengadaan barang dan jasa. Aplikasi ini merupakan sistem terpusat berbasis nasional yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan pengadaan di berbagai instansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, sistem AMEL masih menghadapi sejumlah kendala signifikan, khususnya dalam menjawab kebutuhan lokal

secara cepat dan fleksibel. Beberapa gejala permasalahan yang teridentifikasi di antaranya adalah keterlambatan penyajian data, rendahnya akurasi laporan, laporan yang disusun tidak rinci, serta ketidakanggupan sistem dalam menyediakan informasi secara real-time.

Permasalahan tersebut diperparah oleh sifat sistem AMEL yang terpusat, sehingga unit kerja di daerah memiliki keterbatasan dalam mengakses, mengolah, dan menyesuaikan data sesuai konteks dan urgensi lokal. Selain itu, proses koordinasi antarunit kerja dalam menyusun laporan menjadi memakan waktu dan rentan terjadi kesalahan input karena belum adanya validasi dan standarisasi yang ketat. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah, serta kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar kebijakan.

Sebagai respon atas permasalahan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias mulai mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan lokal berbasis digital yang lebih adaptif terhadap dinamika internal daerah, yaitu aplikasi SIMONIBARJAS (Sistem Monitoring dan Informasi Barang dan Jasa). Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi berbagai keterbatasan AMEL dengan menghadirkan fitur-fitur pelaporan yang lebih cepat, rinci, valid, dan tersedia secara real-time. SIMONIBARJAS memfasilitasi pelacakan dokumen pengadaan, integrasi antarunit kerja secara langsung, serta akses data yang dapat dimonitor oleh pimpinan dan auditor tanpa menunggu proses rekapitulasi manual.

Tabel 1. 1

Perbandingan Sistem AMEL dan SIMONIBARJAS

Aspek	Sistem AMEL	Aplikasi SIMONIBARJAS
Sifat Sistem	Terpusat (Nasional)	Desentralisasi (Daerah)
Aksesibilitas	Terbatas untuk user lokal	Diakses langsung oleh unit kerja daerah
Responsivitas	Tidak fleksibel terhadap kebutuhan lokal	Responsif dan adaptif terhadap kebutuhan daerah
Penyajian Data	Umum dan lambat	Rinci dan real-time
Koordinasi	Bergantung pada input manual antarunit	Terintegrasi dan otomatis

Validasi & Standarisasi	Minim, berpotensi data error	Dilengkapi sistem validasi internal
Dukungan Keputusan	Kurang membantu pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan cepat	Memberikan data yang relevan untuk keputusan berbasis data aktual

Sumber diolah peneliti 2025

Melalui perbandingan ini, terlihat bahwa sistem SIMONIBARJAS hadir untuk mengisi celah kelemahan dalam pelaporan pengadaan barang dan jasa yang tidak mampu dijangkau oleh sistem AMEL. SIMONIBARJAS tidak dimaksudkan untuk menggantikan AMEL secara keseluruhan, namun sebagai sistem pelaporan internal yang lebih adaptif dan mendukung sistem nasional secara komplementer.

Urgensi penerapan sistem pelaporan berbasis lokal seperti SIMONIBARJAS terletak pada kebutuhan akan fleksibilitas, kecepatan, dan relevansi data dalam lingkungan kerja birokrasi daerah. Tidak semua informasi yang dibutuhkan pimpinan dapat menunggu proses pelaporan terpusat yang bersifat birokratis. Ketika pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat, data real-time dan detail sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang bersifat lokal namun terintegrasi, seperti SIMONIBARJAS, menjadi titik temu antara kebutuhan praktis lapangan dan arah kebijakan nasional digitalisasi pemerintahan. Lebih jauh, SIMONIBARJAS juga mendukung semangat reformasi birokrasi yang mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran. Dengan sistem ini, pelaporan dapat dilakukan lebih akurat, efisien dalam waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara digital mendukung pula prinsip-prinsip pengelolaan yang bebas dari korupsi dan kolusi.

Kantor Pengadaan Barang dan Jasa yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Unit ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap proses pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, pelaporan pengadaan barang dan jasa masih sering menghadapi berbagai kendala. Di Kabupaten Nias, selama ini pelaporan dilakukan melalui aplikasi Aplikasi Monitoring Evaluasi (AMEL) yang merupakan sistem berbasis pusat. Meskipun aplikasi ini telah menjadi acuan nasional, penggunaannya di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam mendukung kebutuhan informasi yang cepat, akurat, dan komprehensif.

Permasalahan yang paling sering muncul adalah keterlambatan dan ketidaktepatan dalam penyajian data ketika pimpinan atau pemangku kepentingan membutuhkan informasi real-time. Untuk memperoleh laporan yang dibutuhkan, pihak Sekretariat Daerah harus melakukan koordinasi dengan berbagai unit kerja, yang memakan waktu dan kerap menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, akurasi data yang dikumpulkan juga masih menjadi tantangan. Proses input data yang belum terstandarisasi dengan baik serta minimnya validasi menyebabkan laporan yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi lapangan secara tepat. Laporan monitoring yang dihasilkan pun cenderung umum dan kurang mendetail karena tidak dilengkapi dengan data yang cukup komprehensif. Kondisi tersebut membuat pimpinan kesulitan dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat berbasis data.

Berikut adalah tabel yang merangkum masalah utama, penyebab, dan solusi yang ditawarkan berdasarkan latar belakang di atas. Berikut gambar identifikasi masalah.



Sumber di olah peneliti 2025

Berdasarkan gambar hasil identifikasi masalah di atas, maka terdapat beberapa permasalahan utama dalam pelaporan pengadaan barang dan jasa. Laporan pengadaan masih sering mengalami keterlambatan dan ketidakakuratan, sehingga informasi yang diterima pimpinan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Data

yang disajikan juga belum rinci dan komprehensif, karena laporan cenderung bersifat umum dan kurang menggambarkan progres maupun kendala pengadaan secara detail. Selain itu, akses terhadap informasi pengadaan secara real-time masih sulit dilakukan. Hal ini menyebabkan proses monitoring dan evaluasi tidak dapat berjalan secara optimal serta menghambat pengambilan keputusan yang membutuhkan data terkini. Ketergantungan pada sistem AMEL yang bersifat terpusat juga menjadi kendala, karena sistem tersebut kurang fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan dan dinamika daerah, sehingga unit kerja memiliki keterbatasan dalam mengelola dan memanfaatkan data. Permasalahan lainnya terletak pada proses input data yang masih dilakukan secara manual dengan validasi yang minim, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan data. Koordinasi antarunit kerja dalam penyusunan laporan pun berjalan lambat karena belum terintegrasi secara otomatis, yang berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan informasi. Seluruh kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pelaporan pengadaan barang dan jasa serta mendorong perlunya sistem pelaporan yang lebih adaptif, cepat, dan akurat

KAJIAN TEORITIS

Efektivitas merupakan konsep utama dalam menilai keberhasilan suatu sistem atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agustina (2020) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, di mana semakin dekat hasil yang diperoleh dengan target yang direncanakan, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Pandangan ini sejalan dengan Syam (2020) yang memaknai efektivitas sebagai kesesuaian antara output yang dihasilkan dengan output yang diharapkan berdasarkan input yang digunakan. Dalam konteks organisasi, Robbins (2001) menyatakan bahwa efektivitas mencerminkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan akhirnya. Pada sektor publik, efektivitas juga memiliki landasan regulatif yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang menempatkan efektivitas sebagai indikator penting kinerja instansi pemerintah melalui kesesuaian antara target dan realisasi.

Efektivitas suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh pencapaian tujuan, tetapi juga oleh sejumlah dimensi pendukung. Ketepatan waktu menjadi aspek penting karena

keterlambatan pelaksanaan dapat menurunkan nilai strategis hasil kegiatan (Sutrisno, 2021). Selain itu, akurasi informasi berperan besar dalam menentukan kualitas keputusan yang diambil. Fitriani dan Nugroho (2022) menekankan bahwa data yang akurat dan relevan akan meningkatkan validitas pengambilan keputusan serta meminimalkan kesalahan kebijakan. Dari sisi pengguna, Rahayu dan Pratama (2023) menyatakan bahwa sistem yang efektif adalah sistem yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan regulasi juga menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas jangka panjang (Sari, 2021).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada pengadaan barang dan jasa, pelaporan memiliki peran strategis sebagai instrumen pengawasan dan akuntabilitas. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa pelaporan merupakan bagian integral dari siklus pengadaan yang bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Menurut Bappenas (2021), pelaporan pengadaan merupakan proses penyampaian data secara periodik maupun real-time yang digunakan untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis. Syamsuddin dan Putra (2022) memandang pelaporan sebagai proses administratif yang mendokumentasikan kegiatan pengadaan guna menjamin akuntabilitas anggaran serta mendukung deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Tujuan pelaporan pengadaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis. Pelaporan menyediakan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan, menjadi dasar monitoring dan evaluasi kinerja, serta berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan internal (Maulana, 2023). Selain itu, data pelaporan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan anggaran pada periode berikutnya (Prasetyo & Wulandari, 2021). Oleh karena itu, pelaporan yang efektif harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan akurasi data sebagaimana sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pelaporan pengadaan dari sistem manual menuju sistem digital terintegrasi. Pemanfaatan sistem informasi dalam pelaporan pengadaan dinilai mampu meningkatkan kecepatan, akurasi,

dan keterpaduan data. Dalam konteks ini, SIMONIBARJAS dikembangkan sebagai sistem pelaporan pengadaan berbasis elektronik untuk mendukung monitoring dan pelaporan pengadaan di tingkat daerah. Fitriani dan Nugroho (2022) menyatakan bahwa sistem informasi yang dikembangkan sesuai kebutuhan lokal cenderung lebih efektif dibandingkan sistem terpusat yang kurang fleksibel. Hal ini diperkuat oleh Lestari dan Ramadhan (2021) yang menegaskan bahwa sistem pelaporan terdesentralisasi mampu mempercepat akses informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif.

Secara konseptual, SIMONIBARJAS merupakan implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM). Laudon dan Laudon (2020) mendefinisikan SIM sebagai sistem yang mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Mulyadi (2021) menambahkan bahwa SIM merupakan kombinasi manusia, teknologi, dan prosedur yang digunakan untuk mendukung fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam praktiknya, SIM berperan penting dalam mendukung keputusan berbasis data, meningkatkan transparansi, serta memperkuat fungsi kontrol dan evaluasi kinerja (Prasetyo & Hidayati, 2021).

Meskipun pemanfaatan sistem informasi dalam pelaporan pengadaan dinilai mampu meningkatkan efektivitas tata kelola, kajian empiris mengenai efektivitas implementasi SIMONIBARJAS di tingkat daerah masih terbatas. Selain itu, penelitian yang membahas hambatan implementasi sistem, seperti keterbatasan sumber daya manusia, literasi digital, dan infrastruktur teknologi, juga masih relatif sedikit. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas SIMONIBARJAS menjadi penting untuk memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan sistem pelaporan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Simonibarjas merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memantau progres kegiatan belanja barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Sistem ini memiliki dua level akses, yaitu Administrator dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Administrator bertugas mengelola data master seperti pengguna, unit kerja (OPD), dan memantau seluruh progres kegiatan. Sementara itu, OPD berperan sebagai unit kerja pelaksana yang menginput data kegiatan beserta rincian kegiatannya. Dengan adanya pembagian peran ini, sistem mampu memberikan pemantauan yang terstruktur, transparan, dan efisien terhadap pelaksanaan program.

Form Login



Tampilan awal sistem yang digunakan untuk mengakses aplikasi. Pengguna memasukkan username dan password sesuai level akses yang dimiliki (Administrator atau OPD).

Level Akses Administrator

Dashboard (level administrator)

Dashboard (level administrator)

No	Nama OPD	Nama Kegiatan	Nama Paket	Progres	Pagu
1	PUPR	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0 %	5.624.518
2	PUPR	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belanja Pakaiian Dinas KDH dan WKDH	20 %	120.000.000
3	Dinas Pendidikan	Administrasi Tata Pemerintahan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Cetak	0 %	10.000.000

Menampilkan ringkasan informasi kegiatan secara keseluruhan, termasuk jumlah kegiatan, progres pelaksanaan, dan indikator capaian yang dapat dipantau secara real-time.

Detail kegiatan (level administrator)

SIMONIBARJAS

Administrator

Administrator

MENU

Dashboard

Pengguna

OPD

Ubah Password

Keluar

Dashboard

Detail Kegiatan

Unit KerjaPUPR

Nama KegiatanAdministrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kode RUP56903024

Nama PaketBelanja Pakailan Dinas KDH dan WKDH

Sumber DanaAPBD

Pemilihan PenyediaPengadaan Langsung

PaguRp. 120.000.000

Progress20.00 %

Rincian Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	4	2.500.000	10.000.000
2	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	4	3.500.000	14.000.000
				Total	24.000.000

Administrator

Halaman ini berisi daftar seluruh kegiatan yang diinput oleh OPD, lengkap dengan informasi seperti nama kegiatan, status pelaksanaan, dan tautan untuk melihat rincian kegiatannya.

Data Pengguna (level administrator)

SIMONIBARJAS

Administrator

Administrator

MENU

Dashboard

Pengguna

OPD

Ubah Password

Keluar

Dashboard

Pengguna

Daftar pengguna tingkat OPD

Search:

Showing 1 to 1 of 1 entries

No	Nama Lengkap	Username	Level
1	Admin PUPR	opd.pupr	OPD

Showing 1 to 1 of 1 entries

Tambah

Administrator

2025 © SIMONIBARJAS

Berisi daftar seluruh akun pengguna yang terdaftar di sistem, termasuk informasi nama, username, level akses, dan status akun.

Form Penambahan Pengguna (level administrator)

Digunakan untuk menambahkan akun baru ke dalam sistem. Administrator dapat mengatur username, password, nama pengguna, dan level akses.

Data OPD (level administrator)

The screenshot displays the SIMONIBARJAS application interface. A modal window titled 'Form' is open, allowing the administrator to add a new OPD. The modal includes the following fields:

- Pilih OPD: A dropdown menu with 'Dinas Pendidikan' selected.
- Nama Lengkap: A text input field.
- Username: A text input field.
- Password: A text input field.
- Konfirmasi Password: A text input field.

Buttons at the bottom of the modal are 'Tutup' (Close) and 'Simpan' (Save). The background shows the 'Pengguna' (Users) section with a table of users.

No	Nama Lengkap
1	Admin PUPR

Form Penambahan OPD

The screenshot displays the SIMONIBARJAS application interface. The 'Daftar OPD' (OPD List) section is visible, showing a table of OPDs. The table has the following data:

No	Nama OPD
1	Dinas Pendidikan
2	PUPR
3	Sekretariat Daerah

The interface includes a search bar and pagination controls. The footer shows the user is logged in as 'Administrator'.

The screenshot displays the SIMONIBARJAS application interface. A modal window titled 'Form' is open, allowing the administrator to add a new OPD. The modal contains a single text input field for 'Nama OPD'. Buttons at the bottom of the modal are 'Tutup' (Close) and 'Simpan' (Save). The background shows the 'Daftar OPD' (OPD List) section with a table of OPDs.

No	Nama OPD
1	Dinas Pendidikan
2	PUPR
3	Sekretariat Daerah

Ubah Password

SIMONIBARJAS

Administrator

Administrator

MENU

Dashboard

Pengguna

OPD

Ubah Password

Keluar

Dashboard

Ubah Password

Password Baru

Konfirmasi Password

Ubah Password

Level Akses OPD

Dashboard (level OPD) Menampilkan ringkasan progres kegiatan yang diinput oleh OPD tersebut, termasuk jumlah kegiatan, status pelaksanaan, dan indikator capaian.

SIMONIBARJAS

Admin PUPR

OPD

MENU

Dashboard

Ubah Password

Keluar

Dashboard

Daftar Kegiatan

10 entries

Search:

Tambah

No	Nama OPD	Nama Kegiatan	Nama Paket	Progres	Pagu
1	PUPR	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0 %	5,624,518
2	PUPR	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	20 %	120,000,000

Showing 1 to 2 of 2 entries

<

1

>

Form Penambahan Kegiatan (level OPD)

SIMONIBARJAS

Admin PUPR

OPD

MENU

Dashboard

Ubah Password

Keluar

Dashboard

Daftar Kegiatan

10 entries

Search:

Tambah

No	Nama OPD	Nama Kegiatan	Nama Paket	Progres	Pagu
1	PUPR	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0 %	5,624,518
2	PUPR	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	20 %	120,000,000

Showing 1 to 2 of 2 entries

<

1

>

Form

Nama Kegiatan

Kode RUP

Nama Paket

Sumber Dana

APBD

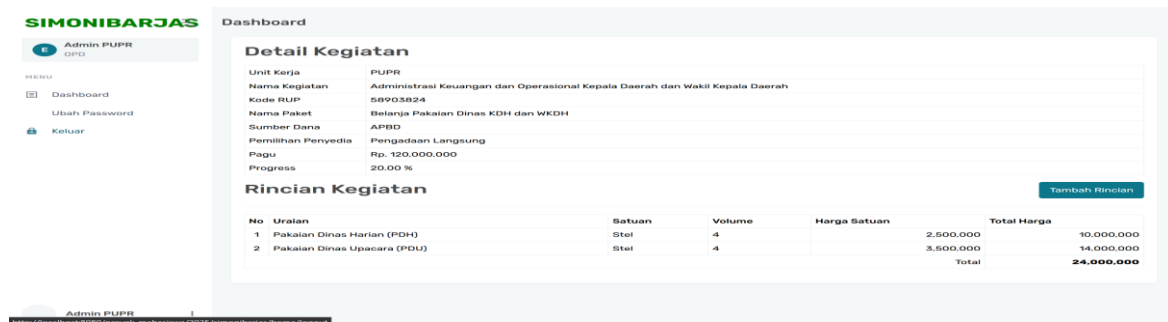
Pagu

Tutup

Simpan

Digunakan oleh OPD untuk menginput kegiatan baru, mencakup nama kegiatan, tahun anggaran, nilai anggaran, dan target pelaksanaan.

Detail Kegiatan (level OPD)



SIMONIBARJAS Dashboard

Admin PUPR OPD

Menu: Dashboard, Ubah Password, Keluar

Detail Kegiatan

Unit Kerja: PUPR
Nama Kegiatan: Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kode RUP: 58903824
Nama Paket: Belanja Pakaiian Dinas KDH dan WKDH
Sumber Dana: APBD
Pemilihan Penyedia: Pengadaan Langsung
Pagu: Rp. 120.000.000
Progress: 20.00 %

Rincian Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	4	2.500.000	10.000.000
2	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	4	3.500.000	14.000.000
Total					24.000.000

Tambah Rincian

Menampilkan daftar kegiatan milik OPD tersebut, lengkap dengan status dan opsi untuk mengelola rincian kegiatan.

Form untuk menambahkan detail pelaksanaan kegiatan, seperti uraian pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, dan total nilai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis efektivitas penerapan SIMONIBARJAS di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, dapat disimpulkan bahwa SIMONIBARJAS terbukti lebih efektif dibandingkan AMEL. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan kecepatan pelaporan dari tiga hari menjadi satu hari, akurasi data yang lebih tinggi melalui validasi otomatis, keterperincian laporan yang lebih komprehensif, serta akses real-time yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat.

Selain itu, SIMONIBARJAS mampu mengatasi berbagai kelemahan AMEL dengan menyediakan sistem pelaporan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, bersifat real-time, lebih rinci, serta terintegrasi antarunit kerja. Persepsi pengguna juga menunjukkan adanya peningkatan kemudahan penggunaan, kecepatan, dan akurasi dalam pemanfaatan SIMONIBARJAS dibandingkan AMEL, meskipun kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan sistem.

Peran sumber daya manusia memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung efektivitas aplikasi, karena teknologi yang canggih tidak akan berfungsi secara optimal tanpa dukungan pegawai yang terlatih dan berkompeten.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, T. (2020). *Manajemen Kinerja Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, N. & Kurniawan, B. (2022). Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 155–168.
- Fitriani, D. & Nugroho, A. (2022). Pengaruh Akurasi Data Terhadap Efektivitas Pelaporan Digital di Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45–59.
- Handayani, L. (2023). *Dokumentasi Digital dalam Evaluasi Sistem Pemerintah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hasibuan, M.S.P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, M. (2020). *Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrawan, R. & Putri, M. A. (2022). *Manajemen Teknologi Informasi Sektor Publik*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Lestari, P. & Ramadhan, F. (2021). *Strategi Digitalisasi Sistem Pemerintahan Daerah*. Malang: UB Press.
- Maulana, R. (2023). Sistem Informasi Pemerintah dan Good Governance. *Jurnal Birokrasi Modern*, 11(1), 88–99.
- Munir, R. (2022). *Efektivitas Pelayanan Publik di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho, A. (2020). *Teknologi Informasi dan Efektivitas Layanan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nugroho, B. (2021). *Teknik Analisis Data Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Prasetyo, D. H. & Wulandari, S. (2021). *Pendekatan Integratif dalam Evaluasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, M. A. & Lestari, R. (2021). *Evaluasi Implementasi Aplikasi Pelaporan Pemerintah Daerah*. Bandung: Citapustaka Media.
- Rachmawati, E. (2021). *Metodologi Penelitian Evaluatif*. Malang: UMM Press.
- Rahayu, N. & Pratama, G. (2023). Kepuasan Pengguna sebagai Indikator Efektivitas Layanan Digital. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Publik*, 7(2), 67–80.
- Robbins, S.P. (2001). *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sari, A. M. (2021). *Adaptabilitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, R. (2022). Evaluasi Sistem Layanan Publik Digital. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 9(3), 121–134.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, E. (2020). Peran SDM dalam Penerapan SPBE. *Jurnal Transformasi Digital*, 3(1),

33–42.

- Susanto, R. (2021). Laporan Evaluasi Sistem Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.
- Syam, M. (2020). Manajemen Efektivitas Organisasi. Makassar: CV. Nurmedia.
- Syamsuddin, H. & Putra, G. (2022). Sistem Pelaporan Pengadaan dalam Good Governance. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(4), 256–273.
- Wijayanti, L. (2021). Teknik Wawancara dalam Evaluasi Sistem Informasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyuni, R. & Sembiring, A. (2020). Optimalisasi Pelaporan Keuangan Pemerintah. Jakarta: Mitra Wacana Media.